



PERLUKAH SMP TERBUKA DI DKI JAKARTA DIPERTAHANKAN?



RINGKASAN EKSEKUTIF

SMP terbuka (SMPT) merupakan pendidikan formal alternatif untuk memperluas akses tamatan sekolah dasar (SD) atau sederajat yang mengalami berbagai kendala untuk melanjutkan pendidikan ke SMP reguler. Di Indonesia, SMPT dirintis pada tahun ajaran 1979/1980. Khusus di DKI Jakarta, SMPT diselenggarakan sejak 1990-an, tetapi hingga saat ini upaya memperluas akses terhadap jalur pendidikan ini belum sepenuhnya berhasil dan SMPT belum mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Permasalahan terkait akses mencakup terus menurunnya jumlah SMPT, dibatasinya jumlah siswa yang diterima, serta kurangnya sosialisasi tentang keberadaan SMPT dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah ini. Sementara itu, permasalahan terkait kualitas pendidikan di SMPT mencakup ketidakpraktisan buku panduan, lemahnya koordinasi dan pengawasan, rendahnya kualitas guru, terbatasnya jumlah dan akses siswa terhadap fasilitas pembelajaran, permasalahan dalam metode pembelajaran, serta rendahnya kedisiplinan dan kualitas siswa.

Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tingkat SMP bagi siswa yang tidak bisa mengakses SMP reguler, terdapat dua opsi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah DKI Jakarta, yaitu (i) menutup SMPT dan menggantinya dengan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dengan SMP swasta berkualitas yang kekurangan siswa atau, jika opsi pertama tidak dapat dilaksanakan di seluruh atau sebagian wilayah DKI Jakarta, (ii) mempertahankan dan mengelola SMPT secara lebih serius melalui perbaikan dalam berbagai aspek agar menjadi sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui upaya tersebut, diharapkan seluruh penduduk muda di DKI Jakarta dapat menamatkan SMP/sederajat dan meraih pendidikan berkualitas.

Latar Belakang

SMPT merupakan pendidikan formal alternatif untuk memberi kesempatan belajar yang lebih luas kepada tamatan SD atau sederajat yang mengalami berbagai kendala untuk melanjutkan pendidikan ke SMP reguler. Di Indonesia, SMPT dirintis pada tahun ajaran 1979/1980. Perintisan SMPT dilatarbelakangi terbatasnya daya tampung SMP yang tersedia dan adanya anak usia sekolah yang menghadapi berbagai kendala untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah reguler, seperti keterpencilan wilayah, keterbatasan sosial-ekonomi, kesulitan infrastruktur dan transportasi, serta keterbatasan waktu belajar. SMPT dipilih karena relatif murah–menginduk pada SMP negeri (SMPN) dan dapat memanfaatkan sumber daya, seperti guru dan bangunan sekolah, yang telah tersedia. Tenaga pengajar SMPT terdiri atas guru bina (guru dari sekolah induk) dan guru pamong (masyarakat yang peduli pendidikan). Pembelajarannya dilaksanakan di sekolah induk dan tempat kegiatan belajar (TKB) yang umumnya berupa bangunan di lingkungan masyarakat.

Khusus di DKI Jakarta, SMPT mulai diselenggarakan pada 1990-an. Meski sudah berjalan selama sekitar tiga dekade, **upaya memperluas akses terhadap jalur pendidikan ini belum sepenuhnya berhasil dan SMPT belum mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.** Tingkat kelulusan siswa memang 100%, tetapi hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya target sekolah untuk meluluskan seluruh siswanya sehingga sekolah menurunkan kriteria ketuntasan minimal dan “mengontrol” nilai siswa. Hasil ujian nasional (UN) siswa SMPT rendah, umumnya di bawah nilai UN terendah siswa SMP induk.

Permasalahan Akses terhadap SMPT

Terbatasnya akses terhadap SMPT disebabkan oleh menurunnya jumlah SMPT di DKI Jakarta dengan tingkat penurunan yang cukup signifikan. Data dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 30 SMPT sebelum tahun ajaran 2018/2019, 26 SMPT pada akhir tahun ajaran 2018/2019, dan 22 SMPT pada awal tahun ajaran 2019/2020.¹ Namun, berdasarkan hasil survei SMERU pada Agustus–September 2019, jumlah SMPT yang beroperasi saat itu hanya 17 sekolah dan 5 di antaranya tidak memiliki siswa di

semua tingkatan sehingga ada kemungkinan sekolah-sekolah tersebut tidak lama lagi akan berhenti beroperasi (Gambar 1).

Penurunan jumlah SMPT didorong oleh beberapa faktor terkait penyelenggaraannya. Pertama, kebijakan terkait penyelenggaraan SMPT terlalu longgar; SMPT bisa dengan mudah dibuka ketika ada permintaan dari masyarakat dan ditutup ketika jumlah siswa tidak memenuhi syarat minimal efisiensi penyelenggaraan. Kedua, koordinasi di antara pihak-pihak yang berperan secara langsung dalam penyelenggaraan SMPT tidak berjalan dengan baik. Ketiga, pengawasan Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan SMPT lemah.² Keempat, sekolah induk kurang atau bahkan tidak berminat untuk menyelenggarakan SMPT. Selain faktor-faktor tersebut, SMPT pada umumnya tidak memiliki surat keputusan (SK) pendirian sehingga keberadaannya tidak berkekuatan hukum.

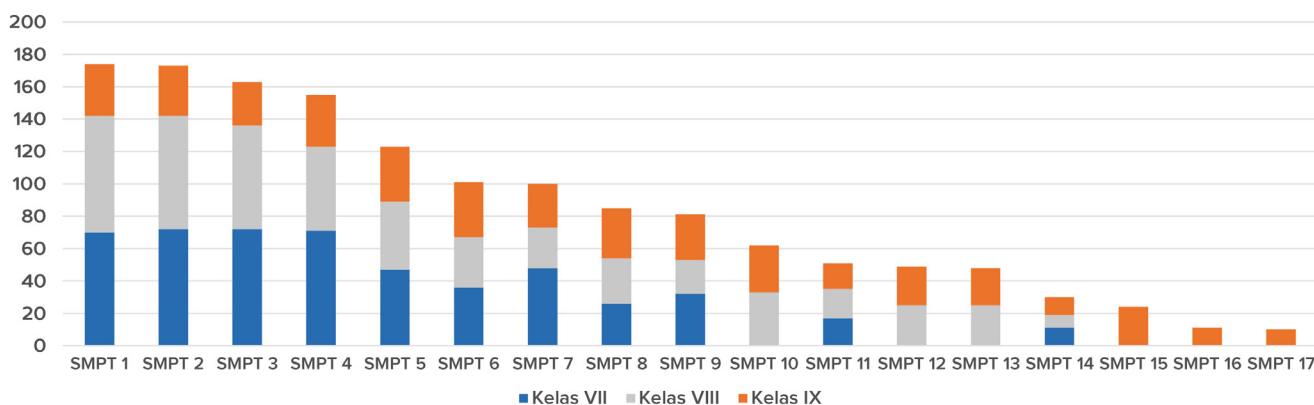
Penurunan jumlah SMPT juga dipengaruhi oleh pembatasan jumlah siswa yang diterima, serta kurangnya sosialisasi tentang keberadaan SMPT dan PPDB-nya. Pada tahun ajaran 2017/2018, terdapat aturan yang membatasi jumlah siswa yang bisa diterima, yaitu hanya satu kelas dengan jumlah siswa maksimum 36 orang, dan pada tahun ajaran 2019/2020, terdapat perubahan batas usia siswa dari 13–18 tahun menjadi 13–15 tahun. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang keberadaan SMPT dan PPDB-nya secara tidak langsung membatasi cakupan pendaftar.

Permasalahan Kualitas Pendidikan di SMPT

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di SMPT adalah panduan penyelenggaraannya yang kurang praktis. Panduan tersebut terdiri atas sembilan buku sehingga rawan tercecer. Selain itu, panduan tersebut pada umumnya dipegang oleh kepala/penanggung jawab sekolah tanpa disosialisasikan lebih lanjut kepada kepada pihak-pihak terkait, termasuk para guru, padahal panduan ini penting untuk dipelajari agar setiap pihak mengetahui peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan SMPT.

¹ Data diperoleh dari dokumen Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dokumen tidak dipublikasikan.

² Lemahnya koordinasi dan pengawasan juga menjadi penyebab rendahnya kualitas pembelajaran di SMPT.



Gambar 1. Jumlah siswa SMPT di DKI Jakarta pada tahun ajaran 2019/2020

Sumber: Hasil survei tim SMERU pada 2019.

Kualitas guru di SMPT juga terindikasi masih rendah. Hal ini terjadi karena rendahnya motivasi mengajar, ketaksesuaian antara kompetensi dan mata pelajaran yang diajar, minimnya kegiatan peningkatan kualitas, dan tidak adanya pelatihan khusus tentang tugas dan fungsi guru di SMPT. Guru pamong pada umumnya tidak memiliki latar belakang sebagai guru SMP dan tidak mendapat insentif yang memadai, yaitu hanya sebesar Rp150.000–Rp800.000 per bulan yang diterima setiap tiga bulan. Sementara itu, belum ada aturan yang mengatur penempatan guru bina sehingga tugas mengajar siswa SMPT cenderung bersifat sukarela.

Siswa SMPT memiliki akses terhadap fasilitas pembelajaran yang terbatas. Meski fasilitas di sekolah induk lengkap, akses siswa SMPT terhadap fasilitas tersebut sangat terbatas karena waktu operasionalnya disesuaikan dengan jadwal sekolah reguler, bukan SMPT. Sementara itu, meski dapat diakses oleh siswa, fasilitas di TKB pada umumnya sangat terbatas (Gambar 2).



Gambar 2. Kegiatan siswa SMPT di salah satu TKB

Rendahnya kualitas pendidikan di SMPT juga disebabkan oleh berbagai masalah terkait metode pembelajarannya. Metode pembelajaran di SMPT disamakan dengan di SMP reguler, yaitu menggunakan Kurikulum 2013 dan dilaksanakan secara tatap muka, tetapi hal ini tidak didukung dengan jumlah buku paket dan waktu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang cukup. Selain itu, konsep belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar (*learning resource*) tambahan, seperti kaset dan video tutorial, tidak berjalan. Modul khusus juga tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan kondisi terkini dan jumlahnya terbatas.

Rendahnya kedisiplinan dan kualitas siswa SMPT merupakan masalah lain yang muncul dalam penyelenggaraan SMPT. Siswa SMPT cenderung kurang disiplin; mereka pada umumnya berasal dari keluarga dan lingkungan yang kurang mendukung. Selain itu, kualitas siswa SMPT juga rendah karena mereka biasanya merupakan siswa dengan nilai UN SD yang tidak cukup untuk diterima di SMPN.

Rekomendasi Kebijakan

Di DKI Jakarta, SMP yang dapat diakses tanpa bayaran pada umumnya hanya SMPN. Namun, karena dayaampungnya terbatas, maka diterapkanlah seleksi nilai akademis. Sementara itu, terdapat lulusan SD yang nilai akademisnya rendah dan tidak mampu melanjutkan pendidikan ke SMP swasta karena terbentur biaya. Bagi kelompok ini, keberadaan SMPT menjadi penting karena dengannya mereka dapat terhindar dari risiko putus sekolah. Kebutuhan akan SMPT tampak dari besarnya jumlah pendaftar yang bisa mencapai lebih dari dua kali kapasitas sekolah. Akan tetapi, akses masyarakat terhadap jalur pendidikan ini terbatas. Kualitas pembelajarannya pun cenderung rendah sehingga lulusan SMPT pada umumnya sulit melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK negeri.

Oleh karena itu, terdapat dua usulan kebijakan pokok bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan SMP bagi penduduk usia sekolah yang berasal dari kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah.

1. **Menutup SMPT dan menggantinya dengan kerja sama penyelenggaraan pendidikan dengan SMP swasta berkualitas yang kekurangan siswa, serta menjamin bahwa semua siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas sekolah secara penuh.**

Kerja sama dengan SMP swasta berkualitas bertujuan menyediakan akses bagi tamatan SD/ sederajat yang terkendala masuk ke SMPN karena masalah nilai akademis dan terkendala masuk ke SMP swasta karena masalah biaya. Kerja sama ini dapat berupa penyediaan biaya sekolah, khususnya biaya masuk dan biaya bulanan, yang tidak

dapat dipenuhi dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta. Untuk opsi ini, Pemerintah DKI Jakarta perlu memilih SMP swasta yang memenuhi SNP dan Dinas Pendidikan perlu menerapkan sistem pengawasan yang ketat.

Kerja sama dengan SMP swasta merupakan alternatif yang lebih praktis daripada membangun sekolah baru. Pembangunan sekolah baru membutuhkan investasi dan sumber daya yang tidak sedikit serta memakan waktu, apalagi di DKI Jakarta lahan yang tersedia relatif terbatas dan jumlah SMP swasta yang ada cukup memadai. Menurut Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tahun ajaran 2019/2020, di DKI Jakarta terdapat 1.074 SMP yang terdiri atas 293 SMPN dan 781 SMP swasta.³ Di SMPN, jumlah siswa sudah sesuai atau bahkan melebihi daya tampung sekolah. Sementara itu, terdapat cukup banyak SMP swasta yang kekurangan siswa. Kondisi tersebut

³ Diakses melalui <https://dapodikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/1/010000>.

The SMERU Research Institute

Penulis:
Hastuti

Editor:
Wiwin Purbaningrum

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2020 SMERU
Untuk catatan kebijakan
lainnya, silakan kunjungi
www.smeru.or.id.

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336

 +6221 3193 0850 (faks)

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id

 The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan kebijakan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

diduga menjadi penyebab dibatasinya jumlah siswa yang diterima di SMPT pada tahun ajaran 2017/2018—beberapa sekolah swasta berkeberatan dengan keberadaan SMPT karena merasa tersaingi dalam mendapatkan siswa.

2. Jika opsi pertama tidak dapat dilaksanakan, baik di seluruh maupun sebagian wilayah DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta perlu mempertahankan dan mengelola SMPT secara lebih serius dengan mengedepankan profesionalisme melalui perbaikan dalam beberapa aspek berikut agar SMPT menjadi sekolah yang memenuhi SNP.
 - a) **Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk memperbarui buku panduan penyelenggaraan SMPT.** Buku panduan yang terdiri atas sembilan buku perlu dirampingkan dan dipadatkan menjadi satu pedoman yang ringkas dan kompak agar lebih mudah dipahami dan dapat meminimalkan kemungkinan tidak sampainya sebagian panduan kepada pemangku kepentingan. Buku panduan juga perlu memuat aturan yang lebih mengikat mengenai keberadaan dan keberlangsungan SMPT sehingga pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan SMPT tidak semata-mata berdasarkan kebijakan sekolah induk. Pemerintah DKI Jakarta juga perlu membuat petunjuk internal mengenai penyelenggaraan SMPT yang memuat standar minimal pelayanan SMPT, termasuk kuantitas dan kualitas guru, kegiatan belajar-mengajar, pengawasan dan koordinasi, serta sarana dan prasarana di sekolah induk dan TKB. Legalitas pendirian tiap SMPT juga perlu diperkuat untuk menjamin keberlangsungan sekolah ini.
 - b) **Menggalakkan sosialisasi beberapa aspek SMPT kepada pihak-pihak terkait.** Keberadaan SMPT dan PPDB-nya perlu disampaikan secara terbuka dan luas, seperti melalui pengumuman resmi kepada seluruh SD/ sederajat dan perangkat pemerintah kelurahan di DKI Jakarta, serta melalui pemasangan papan nama sekolah dan spanduk PPDB. Selain itu, konsep SMPT dan materi dalam buku panduan perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti sekolah dan guru, termasuk guru pamong.
 - c) **Meningkatkan kualitas dan motivasi mengajar para guru,** antara lain, dengan menyediakan anggaran untuk memberikan insentif yang memadai, menyediakan pelatihan yang berkualitas dan dapat diakses oleh guru secara merata, dan menyelenggarakan diskusi rutin bagi para guru, seperti kegiatan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) di sekolah reguler. Selain itu, perlu ada ketentuan yang sifatnya lebih mengikat tentang penunjukan dan pengangkatan guru SMP reguler menjadi guru bina, serta pengakuan penuh atas profesi dan jumlah jam mengajar guru di SMPT.
 - d) **Mendorong para pengelola sekolah dan guru untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan perhatian secara lebih intensif kepada siswa SMPT.** Penggunaan Kurikulum 2013, sebagaimana halnya di SMP reguler, sudah sesuai untuk mendukung lulusan SMPT agar mereka memiliki bekal pengetahuan dasar dan kesempatan melanjutkan pendidikan yang setara dengan lulusan SMP reguler. Namun, diperlukan penyesuaian metode pembelajaran untuk mengompensasi waktu belajar siswa SMPT yang lebih pendek. Perlu juga dipastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses seluruh buku paket secara penuh. Selain itu, metode pembelajaran yang menitikberatkan pada kemandirian siswa perlu dikaji ulang karena siswa SMPT memiliki kemampuan akademis yang relatif lebih rendah daripada siswa SMP reguler dan mereka merupakan kelompok usia anak yang masih sangat bergantung pada bimbingan guru secara langsung.
 - e) **Memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan di setiap tingkatan,** mulai dari Dinas Pendidikan, Subdinas Pendidikan, pengawas sekolah, hingga SMPT. Koordinasi ini mencakup, antara lain, sosialisasi penyelenggaraan SMPT, sistem pelaporan, dan kegiatan PPDB. ■